

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Teori

A.1 Kepercayaan

1. Defenisi Kepercayaan

Kepercayaan (*trust*) merupakan pondasi dari suatu hubungan. Suatu hubungan antara dua pihak atau lebih akan terjadi apabila masing-masing saling mempercayai. Kepercayaan ini tidak begitu saja dapat diakui oleh pihak lain, melainkan harus dibangun mulai dari awal dan dapat dibuktikan. Di dunia ekonomi, kepercayaan telah dipertimbangkan sebagai katalis dalam berbagai transaksi antara penjual dan pembeli agar kepuasan konsumen dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan (Yousafzai, 2003).

Menurut Deutsch (dalam Yilmaz dan Atalay, 2009), kepercayaan adalah perilaku individu, yang mengharapakan seseorang agar memberi manfaat positif. Adanya kepercayaan karena individu yang dipercaya dapat memberi manfaat dan melakukan apa yang diinginkan oleh individu yang memberikan kepercayaan. Sehingga, kepercayaan menjadi dasar bagi kedua pihak untuk melakukan kerjasama.

Francis Fukuyama mendefinisikan kepercayaan sebagai harapan yang timbul dari masyarakat dimana semua anggota harus bertindak dalam batas norma, dengan keteraturan, kejujuran, dan kerjasama. Carnevale dan Wechsler mendefenisikan kepercayaan adalah suatu sikap yang menganggap bahwa

individu atau kelompok bermaksud baik, adil dan sesuai dengan norma etika (dalam Yilmaz dan Atalay, 2009).

Dasgupta (1988) menyatakan bahwa kepercayaan merupakan suatu sikap untuk mempercayai individu dan kelompok dengan tingkatan tertentu yang saling berhubungan. Pada tingkat individu, anda mempercayai seorang individu untuk melakukan sesuatu berdasarkan apa yang anda ketahui tentangnya, disposisi, kemampuannya, reputasi dan sebagainya tidak hanya karena dia bilang dia akan melakukannya. Pada tingkat kolektif, jika anda tidak percaya suatu badan atau organisasi dengan mana individu berafiliasi, anda tidak akan percaya padanya untuk membuat kesepakatan atau kerja sama.

Mayer (1995) mendefinisikan kepercayaan adalah kemauan seseorang untuk peka terhadap tindakan orang lain berdasarkan pada harapan bahwa orang lain akan melakukan tindakan tertentu pada orang yang mempercayainya, tanpa tergantung pada kemampuannya untuk mengawasi dan mengendalikannya. Mayer menjelaskan konsep ini bahwa orang yang dipercaya memiliki kemauan dan kepekaan pada harapan orang lain yang meyakini bahwa tindakannya berperan sangat penting.

Yamagishi (dalam Hakim, Thontowi, Yuniarti dan Kim, 2010) memformulasikan kepercayaan sebagai anggapan bahwa setiap orang tidak bermaksud negatif terhadap dirinya. Ini apa yang disebut kepercayaan secara umum. Untuk mempercayai orang lain, individu memiliki indikator kepercayaan diri berdasarkan tingginya kepekaan dan keterampilan untuk membedakan antara perasaan dapat dipercaya dan tidak dipercaya. Pada dasarnya semua orang dapat

dipercaya hingga suatu hal tertentu membuat individu tersebut tidak dapat dipercaya lagi.

Menurut Moordiningsih (2010), kepercayaan (*trust*) di Asia Timur, kepercayaan merupakan konsep relasional bukan individual. Ia tidak berkaitan dengan kepentingan atau keuntungan pribadi individu. Kepercayaan adalah konsep yang mengandung harmoni, jaminan, dan kesejahteraan untuk individu dan komunitas. Kepercayaan dikembangkan mulai dari keluarga, dalam kelekatan hubungan orang tua dan anak. Kemudian kepercayaan berkembang dalam lingkungan kerabat dan teman dekat.

Lebih lanjut, Moordiningsih (2010) mengatakan bahwa membangun kepercayaan pada orang lain merupakan hal yang tidak mudah. Kepercayaan terbentuk melalui rangkaian perilaku antara orang yang memberikan kepercayaan dan orang yang dipercayakan tersebut. Kepercayaan muncul dari pengalaman dua pihak yang sebelumnya bekerja sama atau berkolaborasi dalam sebuah kegiatan atau organisasi. Pengalaman ini memberikan kesan positif bagi kedua pihak sehingga mereka saling mempercayai dan tidak berkhianat, yang dengan itu dapat merusak komitmen.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kepercayaan adalah keyakinan individu akan kebaikan individu atau kelompok lain dalam melaksanakan tugas dan kewajiban untuk kepentingan bersama.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepercayaan

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan menurut Job (2005) dan Putnam (dalam Tranter dan Skrbis, 2009), ada dua yaitu:

- a. Faktor rasional. Faktor rasional bersifat strategis dan kalkulatif dengan kata lain orang dapat dipercaya karena memiliki keahlian khusus atau memiliki jabatan profesional. Orang yang memberikan kepercayaan (*trustor*) dapat memperkirakan apakah orang yang mendapat kepercayaan (*trustee*) dapat melaksanakan tuntutan *trustor* tersebut. Pandangan bahwa munculnya kepercayaan pada umumnya dari faktor rasional (Coleman, Gambetta, Hardin, Luhmann, Yamagishi, dalam Job, 2005; Braun, 2011), dan asumsi bahwa untuk memberi kepercayaan (*trust*) kepada orang lain harus terlebih dahulu mendapat informasi atau pengetahuan tentangnya.
- b. Faktor relasional. Faktor relasional disebut juga faktor afektif atau moralistik. Kepercayaan relasional berakar melalui etika yang baik, dan berbasis pada kebaikan seseorang. Kepercayaan relasional memiliki dasar nilai yang disepakati suatu komunitas, gerak hati, dan kepentingan bersama. Komunitas memiliki pertimbangan sebelum memberikan kepercayaan dan sebuah perubahan tidak dibebankan pada satu orang saja (Mishler & Rose dalam Job, 2005). Teori relasional mengatakan kepercayaan merupakan hal yang terkondisi melalui budaya dan pengalaman, keyakinan mengenai orang yang dapat bekerja di institusi politik.

Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan terdiri dari dua hal yakni faktor rasional dan faktor relasional.

3. Faktor-Faktor yang Membentuk Kepercayaan

Menurut Mayer (dalam Ainurrofiq, 2007) faktor yang membentuk kepercayaan seseorang terhadap yang lain ada tiga yaitu:

- a. Kemampuan. Kepercayaan adalah ranah khusus, sehingga individu membutuhkan keyakinan akan seberapa baik seseorang memperhatikan performanya. Faktor pengalaman dan pembuktian performanya akan mendasari munculnya kepercayaan orang lain terhadap individu. Kim (dalam Ainurrofiq, 2007) menyatakan bahwa *ability* meliputi kompetensi, pengalaman, pengesahan institusional, dan kemampuan dalam ilmu pengetahuan.
- b. Integritas. Integritas terlihat dari konsistensi antara ucapan dan perbuatan dengan nilai-nilai diri seseorang. Kejujuran saja tidak cukup untuk menjelaskan tentang integritas, namun integritas memerlukan keteguhan hati dalam menerima tekanan. Kim (dalam Ainurrofiq, 2007) mengemukakan bahwa *integrity* dapat dilihat dari sudut kewajaran (*fairness*), pemenuhan (*fulfillment*), kesetiaan (*loyalty*), keterus-terangan (*honestly*), keterkaitan (*dependability*), dan kehandalan (*reliability*).
- c. Kebaikan hati. Kebaikan hati berkaitan dengan intensi (niat). Ada ketertarikan dalam diri seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain. Hal tersebut akan mengarahkannya untuk memikirkan orang tersebut dan memberikan intensi untuk percaya atau tidak dengan orang tersebut.

Menurut Kim (dalam Ainurrofiq, 2007), *benevolence* meliputi perhatian, empati, keyakinan, dan daya terima.

Adanya beberapa faktor yang telah disebutkan maka dapat disimpulkan faktor yang membentuk kepercayaan antara individu dengan yang lain yaitu faktor kemampuan, integritas dan faktor kebaikan hati.

A.2 Politisi

1. Defenisi Politisi

Politisi adalah orang yang berkecimpung di bidang politik (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008). Sementara politik diartikan bermacam-macam. Salah satunya dikemukakan Coser (dalam Sudiyono, 2010): “*politic is a process of deciding who gets what, when and how*”. Menurut Sudiyono (2010), politisi ini dapat meliputi anggota legislatif maupun eksekutif. Badan legislatif dapat berupa DPRD, DPR, dan DPD, sedangkan eksekutif meliputi bupati/walikota, gubernur dan presiden. Semua dipilih berdasarkan prinsip *one man, one vote* oleh rakyat.

Sebelum mendefenisikan politisi lebih baik diketahui terlebih dahulu mengenai politik. Politik adalah pelbagai kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses penentuan tujuan dan pelaksanaan seluruh masyarakat melalui pengambilan keputusan berupa nilai, ide, dan norma, kepercayaan dan keyakinan seseorang atau kelompok terhadap suatu kejadian dan masalah politik yang dihadapinya (Budiharsono, 2003).

Politik adalah pembicaraan atau lebih tepat, kegiatan politik adalah berbicara. Politik tidak hanya pembicaraan, juga tidak semua pembicaraan adalah

politik. Akan tetapi hakikat pengalaman politik dan bukan hanya kondisi dasarnya ialah bahwa politik adalah kegiatan berkomunikasi antara orang-orang (Varma, 2001).

Hasil FGD mengenai definisi politik dan politisi perspektif mahasiswa Universitas Riau:

“secara umum politik adalah sebuah seni untuk mencapai tujuan. Politik kalau di Indonesia itu ya birokrasi tidak melulu pemimpin pemerintahan. Birokrasi inilah yang mengatur jalannya pemerintahan sekaligus melaksanakan aturan itu. Sementara kalau pelaku politik itu disebut aktor politik. Aktor politik itu adalah siapa saja yang memiliki kepentingan dan berusaha mewujudkannya. Misalnya, mahasiswa berpolitik adalah bagaimana caranya mendapatkan nilai yang bagus, politik birokrat dengan cara berpartai.

Politik yang ada di pemerintahan nama nya perpolitikan secara resmi yang punya aturan. Politik itu cara sedangkan politisi itu pelaku. Politisi adalah individu yang secara resmi baik aturan dan norma terlibat dalam dunia politik. Politisi di Indonesia disebut birokrat. Saya tak setuju kalau presiden dan pemimpin pemerintahan saja yang disebut politisi karena belum tentu dia sendiri yang membuat keputusan. Itu semua kepentingan koalisi partainya”.

Jadi, politik secara umum adalah cara untuk mewujudkan suatu tujuan. Politik di pemerintahan adalah politik yang secara resmi yang sudah diatur oleh undang-undang untuk mengelola kepentingan warga dan negara. Sedangkan politisi adalah orang yang terlibat dalam dunia politik pemerintahan sesuai etika dan norma.

Politisi merupakan aktor seni dalam meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional. Mereka adalah orang yang dipilih oleh rakyat secara demokratis untuk menduduki kursi legislatif seperti DPR, DPD, dan DPRD dan eksekutif seperti bupati, gubernur dan presiden melalui pemilihan umum (pemilu) (Budiharsono, 2003).

Politisi merupakan orang-orang yang berkecimpung dalam organisasi masyarakat yang bernama partai maupun dalam institusi pemerintahan. Sebagai negara demokrasi, maka rakyat Indonesia mutlak menggunakan partai sebagai alat menyalurkan aspirasinya. Politisi menempati posisi sebagai pemimpin pemerintahan, aktivis partai yang mengadvokasi kebutuhan rakyat dan wakil rakyat yang bertugas di DPR.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa politisi adalah individu yang membuat keputusan, membagi kekuasaan, dan mengelola kehidupan bermasyarakat di daerah dan dalam skala negara.

2. Pengertian Partai Politik

Adanya partai merupakan legalitas hukum untuk mengayomi profesi politisi dan wadah bagi pembelajaran politiknya. Partai politik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan politisi atau aktor politik dan dunia politik di Indonesia, khususnya. Dalam perspektif behaviorisme, individu ditempatkan sebagai unit terkecil dari sebuah sistem politik. Oleh karena itu, individu dapat dilihat sebagai kekuatan politik, terutama individu yang berkedudukan sebagai pemimpin politik (Mufti, 2013). Dalam sistem politik, unit-unit politik yang

membentuk sistem politik berwujud tindakan-tindakan politik. Politisi tidak dapat membuat kebijakan atau melakukan tindakan politik dalam masyarakat tanpa ada partai yang menaunginya. Pada tataran birokrasi, tidak ada jabatan yang tidak mensyaratkan dukungan partai politik, baik langsung maupun tidak langsung (Mufti, 2013).

Berdirinya partai sebagai organisasi masyarakat telah dijamin dalam UUD 1945 Perubahan Ke-empat berikut:

Pasal 28: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 28C ayat 2: Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 28D ayat 3: Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Dengan demikian, mendirikan partai telah dilegitimasi dalam memberikan peran dan pengaruh dalam tatanan negara dan pemerintahan.

Ada beberapa bentuk kegiatan partai yang dapat dijadikan kunci untuk membedakannya dari institusi lain (Mufti, 2013), *Pertama*, partai politik merupakan institusi yang menyatukan rakyat sebagai tujuan untuk melaksanakan kekuasaan dari dalam negara. Misalnya, partai Ghandi yang membubarkan

Kongres Nasional India dan meruntuhkan rezim dengan membentuk partai anti rezim.

Kedua, partai berusaha untuk menggunakan maksud-maksud sahnya untuk mengejar tujuan sendiri. Partai sebagai organisasi masyarakat bisa terlibat dalam konflik terbuka dan bersenjata dengan sebuah rezim, baik memutuskan dengan terpaksa untuk menggunakan kekerasan maupun karena rezim telah memilih untuk menekannya secara paksa. Misalnya, partai komunis cina yang melawan pemerintahan nasionalis pada tahun 1930-an.

Ketiga, partai dapat bertanding dalam pemilu di sebuah negara. Partai menempatkan kandidat-kandidatnya (politisi) agar terlibat dalam pemilu untuk kantor pemerintahan publik. Banyak partai memandang pemilu sebagai alat untuk mempertontonkan kekuatan politik, bahkan ketika mereka tidak memiliki tujuan apa pun untuk mengikuti pemerintahan pasca pemilu.

Keempat, partai adalah institusi yang mencoba untuk merepresentasikan lebih dari satu kepentingan pada masyarakat. Akan tetapi, meskipun pendapat ini benar, tidak semua partai dalam setiap kasusnya mencoba untuk menarik kepentingan masyarakat luas; dan *kelima*, partai adalah sekumpulan orang dengan kepercayaan, sikap, dan nilai yang sama atau menurut Edmund Burke pada abad ke-18 bahwa partai adalah sekumpulan orang yang berpikiran sama atau disebut opini yang terorganisasi (*organized opinion*).

Menurut Mufti (2013), partai politik adalah institusi yang (a) mencoba mendapatkan pengaruh dalam sebuah negara, kerap dengan mencoba menguasai posisi dalam pemerintahan, dan (b) biasanya mengandung lebih dari satu

kepentingan tunggal dari masyarakat dan pada tingkat tertentu berusaha ”mengumpulkan kepentingan”.

Partai politik menjadi alat dan sarana untuk mendapatkan kekuasaan di parlemen dan pemerintahan dengan cara menarik simpati rakyat untuk memilih partai tersebut guna memenangkan pemilu. Hal ini dikarenakan, semakin banyak simpati dan dukungan rakyat, semakin besar pula kesempatan bagi partai politik tersebut untuk menguasai parlemen atau pemerintah. Oleh karena itu, partai politik harus menjalankan fungsinya dengan baik dan benar sesuai dengan garis dan haluan partai. Partai yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik, partai tersebut akan ditinggalkan oleh para pendukungnya (Mufti, 2013).

A.3 Proses Timbulnya Kepercayaan (*Trust*) antara *Trustor* dan *Trustee*

Kepercayaan dapat timbul sebagai hasil hubungan langsung antara dua orang atau lebih yang bersifat asosiatif. Misalnya, B sebagai orang yang dikuasai mengadakan hubungan langsung dengan A sebagai pemegang kekuasaan. B percaya sepenuhnya kepada A kalau A akan selalu bertindak dan berlaku baik. Dengan demikian, setiap keinginan A akan selalu dilaksanakan oleh B. Kemungkinan sekali bahwa B sama sekali tidak mengetahui kegunaan tindakan-tindakannya itu. Akan tetapi, karena dia telah menaruh kepercayaan kepada si A, dia akan berbuat hal-hal yang sesuai dengan kemauan A yang merupakan penguasa agar A semakin mempercayai B. Pada contoh tersebut, hubungan yang terjadi bersifat pribadi, tetapi mungkin saja hubungan demikian akan berkembang di dalam suatu organisasi atau masyarakat secara luas (Soekanto, 2006).

Menurut Good (2008), membangun kepercayaan adalah strategi menciptakan hubungan kerjasama dengan individu lain. Jika A mempercayai B untuk melakukan rencana C, maka A telah mempercayai B pada tahapan pertama, bahwa kepuasan tujuan A memerlukan B untuk melakukan C, dan tidak melakukan hal lain yang akan merugikan kepentingan A. sepertinya A tidak bekerjasama dengan B, tapi B sendiri lah yang melakukan C, dan pada saat yang sama B tidak menaruh kepercayaan terhadap A. Akan tetapi, pada kesempatan lain hal ini menjadi terbalik. B mempercayai A untuk memberikan dukungan pada kondisi permintaan untuk melakukan C, dengan kata lain A melakukan kerjasama untuk menciptakan dukungan. Perilaku A dan B merupakan dasar terbentuknya kepercayaan dan kerjasama antara kedua belah pihak.

Adanya kepercayaan karena kedua pihak yang melakukan kerjasama saling memberi harapan. *Trustor* (orang yang memberi kepercayaan) mempercayai *trustee* (orang yang mendapat kepercayaan) melakukan suatu hal yang menjadi harapan *trustor*. *Trustee* mempercayai *trustor* untuk memberikan dukungan dalam memenuhi harapan *trustor*. Hal ini dapat disimpulkan bahwa jika tidak ada harapan, maka tidak ada kepercayaan, dan jika tidak ada kepercayaan, maka tidak ada kerjasama. Jadi, timbulnya kepercayaan karena adanya harapan kedua pihak untuk menciptakan hubungan kerjasama.

B. Kerangka Berfikir

Kepercayaan (*trust*) adalah keyakinan individu akan kebaikan individu atau kelompok lain dalam melaksanakan tugas dan kewajiban untuk kepentingan bersama. Kepercayaan terhadap politisi ditekankan pada teori Job (2005) bahwa politisi dipercaya jika mereka memiliki sikap dan misi dalam organisasi politik, pemerintahan, dan orang-orang yang mampu menjalankan sistem pemerintahan. Menurut Moordiningsih (2010), kepercayaan terhadap politisi adalah ketika rakyat memberi kepercayaan dan harapan terhadap politisi yang mampu mengelola pemerintahan daerah maupun pemerintahan negara.

Kepercayaan merupakan suatu fenomena yang dinamis yang terjadi secara intrinsik pada suatu keadaan yang alamiah, dimana kepercayaan merupakan hal yang menyangkut masalah mental yang didasarkan oleh suatu situasi seseorang dan konteks sosialnya (Falcone dan Castelfranci dalam Hidayat, dkk 2012), misalnya ketika seseorang ingin memilih wakil rakyat. Ia akan lebih memilih kandidat berdasarkan pilihan dari orang-orang yang lebih ia percayai.

Menurut Almond dan Verba (dalam Hardin, 2006) kepercayaan terhadap politisi adalah ketika individu yang dermawan dipercaya memiliki dorongan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik. Individu yang dipercaya merupakan agen pemerintah yang telah disetujui masyarakat (Klein dalam Hardin, 2006).

Di Indonesia, pengetahuan, nilai, dan perilaku merupakan bentuk aktualisasi dari kepercayaan dan warisan budaya leluhur seperti cerita dongeng, cerita rakyat, atau seni wayang dalam dua metode yakni tertulis seperti buku dan cerita dari mulut ke mulut. Politisi dianggap sebagai orang yang dipilih dan dapat

diandalkan mengelola pemerintahan daerah maupun pemerintahan negara. Oleh karena itu, kepercayaan terhadap politisi juga meliputi pengetahuan, nilai dan tata krama yang melekat pada politisi yang diceritakan dari orangtua dan guru (Moordiningsih, 2010).

Jika Politisi mampu merespon tuntutan masyarakatnya mulai dari pemilu sampai di tingkat organisasi pemerintahan, maka masyarakat akan memberikan umpan balik berupa kepercayaan (*trust*). Kepercayaan masyarakat merupakan dasar tindakan seorang politisi dan merupakan konsekuensi berjalannya proses politik (Mishler dan Rose, 2005). Sementara Job (2005) menyatakan bahwa dasar kepercayaan tersebut bersifat relasional, yakni berdasarkan apa yang terjadi selama interaksi antara masyarakat dan politisi. Jika politisi dapat dipercaya pada umumnya, maka kepercayaan itu tetap ada meskipun beberapa politisi memiliki reputasi yang buruk.

Kepercayaan merupakan salah satu faktor dalam menentukan keberhasilan politisi dalam mengelola kehidupan bermasyarakat. Semua elemen masyarakat dan politisi harus mengadakan kerjasama untuk menciptakan kesejahteraan dan perbaikan untuk kepentingan bersama. Akan tetapi, jika kepercayaan terhadap para politisi masih rendah, mahasiswa tentunya memiliki alasan-alasan untuk tidak percaya terhadap politisi.

C. Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan dalam penelitian ini adalah hal apa sajakah yang menjadi alasan bagi mahasiswa untuk tidak percaya terhadap politisi?